

# PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL

Oleh :  
**Abdul Khakim**  
**Miftakhul Munir**

Dosen STIT PGRI Pasuruan

**Abstrak :** *Kemajemukan bangsa ini, disatu sisi merupakan aset kekayaan khasanah budaya bangsa, namun disisi lain dapat menjadi potensi konflik tatkala tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak memiliki sikap yang proposional terhadap kemajemukan ini. Kemajemukan yang memiliki potensi konflik tinggi dan sentral yaitu isu yang berkenaan dengan kemajemukan beragama. Agama merupakan isu yang sangat sentral dan cepat menimbulkan konflik dikalangan masyarakat. Maka dari itu, artikel ini ditulis guna untuk mencoba menggagas wacana tentang pendidikan agama islam dengan membawa misi pluralisme agama, humanisme, dan demokrasi. Dan memberikan solusi serta pencerahan dalam menuju suatu perubahan yang signifikan terhadap pendidikan agama islam dalam segala aspeknya, sehingga pendidikan agama islam menjadi pendidikan yang inklusif dan dinamis.*

**Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Multikultural**

## A. Pendahuluan

Di antara idealitas keagamaan Islam sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an<sup>1</sup> adalah untuk saling mengenal dan menghormati berbagai budaya, ras, dan agama sebagai suatu realitas kemanusiaan. Akan tetapi pada saat yang sama peta dunia diwarnai konflik akibat SARA.<sup>2</sup> Kesenjangan antara idealitas dan realitas itulah yang perlu dijumpai dengan memberikan pemahaman multikultural dalam proses pendidikan keislaman.

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta sebagai macam aliran kepercayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> QS. al-Hujurat : 13

<sup>2</sup> Seperti yang terjadi di Sambas, Sampit, Ambon, Poso, yang paling hangat kasus pengeboman Vihara di Jakarta Barat. Menurut Setara Institut di Jakarta, terdapat berbagai kasus tiap tahunnya yang berkenaan dengan masalah SARA terutama agama, terdapat 216 serangan terhadap minoritas beragama pada tahun 2010, 244 kasus pada tahun 2011, 264 kasus pada tahun 2012. Di Jakarta menurut Wahid Institute, mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan 184 intoleransi pada tahun 2011.

<sup>3</sup> Keragaman beragama dapat dilihat dari presentasi penduduk yang menyatakan diri sebagai pemeluk salah satu agama, sebagai berikut : Islam (88%), Kristen (6,11%), Katolik (3,18%), Hindu (1,79%), Budha (0,61%) Konghucu (0,10%), dan lain-lain (0,11%). Dilihat dari keragaman suku, sebagai berikut: Suku Jawa adalah

Selama puluhan tahun Indonesia dikenal atau diklaim sebagai bangsa yang sopan, ramah dan toleran. Dengan beragam agama, etnis, bahasa dan kebudayaan lokal yang demikian kaya, masyarakat Indonesia pada masa-masa pra dan awal kemerdekaan bisa hidup rukun satu sama lain. Tidak terdengar kasus-kasus konflik antar agama maupun etnis yang dipicu semata-mata karena perbedaan latar dan afiliasi kultural dan religius mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu untuk menyongsong kemerdekaan dan tumbuhnya solidaritas kebangsaan.<sup>4</sup>

Di tengah bangsa dan masyarakat yang multikultural-multireligius, persoalan sosial-keagamaan memang bukan persoalan yang sederhana. Kompleksitas hubungan sosial antarumat beragama ini dirasakan oleh seluruh elemen dalam masyarakat, mulai dari politisi, guru, tokoh agama dan orang tua di rumah. Menafikan keberadaan tradisi-tradisi agama di muka bumi merupakan pekerjaan yang sia-sia. Masing-masing mempunyai hak yang sama, masing-masing mempunyai cara untuk mempertahankan tradisi dan identitasnya sendiri-sendiri dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.<sup>5</sup>

Menurut Amin Abdullah, cara yang paling tepat untuk mempertahankan tradisi dan identitas keagamaan di atas adalah melalui jalur pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk meneruskan, melanggengkan, mengawetkan, dan mengonservasi tradisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari abad yang satu ke abad yang lain.

Pendidikan merupakan salah satu media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif. Sebab, pendidikan bersifat sistemik dengan tingkat penyebaran yang cukup merata. Lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan telah tersebar secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana yang cukup efektif untuk mencapai tujuan ideal ini.<sup>6</sup>

Secara historis, pendidikan multikultural muncul pada lembaga-lembaga pendidikan tertentu di wilayah Amerika yang pada awalnya diwarnai oleh sistem pendidikan yang

---

kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai (41,7%) dari total populasi, suku sunda (15,41%) dari total populasi, suku Tionghoa Indonesia berjumlah sekitar (3,7%) dari total populasi, suku melayu (3,4%), suku Madura (3,3%), suku Batak (3,0%), suku Minagkbau (2,7%), suku betwi (2,5%), suku Bugis (2,5%), suku Arab-Indonesia (2,4%), suku Banten (2,1%), suku Banjar (1,7%), suku Bali (1,5%), suku Sasak (1,3%), suku Makasar (1,0%), suku Cirebon (0,9%)

<sup>4</sup> Pada tahun 1979, di kota Vatikan Roma, diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap, Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Bahkan Paus Paulus II pun mengatakan "Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama namun hidup dalam kerukunan dan keramahtamahan.

<sup>5</sup> M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 2.

<sup>6</sup> Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 8.

mengandung diskriminasi etnis, yang kemudian belakangan hari mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pendidikan multikultural sendiri merupakan strategi pembelajaran yang menjadikan latar belakang budaya siswa yang bermacam-macam digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Yang demikian ini dirancang untuk menunjang dan memperluas konsep-konsep budaya, perbedaan, kesamaan dan demokrasi.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini pendidikan islam berbasis multikultural merupakan pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.<sup>8</sup>

## **B. Pendidikan Multikulturalisme**

Multikulturalisme secara bahasa istilah ini berasal dari kata kebudayaan. Secara etimologis multikulturalisme tersusun dari kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang memiliki arti aliran atau paham. Dalam kata tersebut terdapat makna pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kehidupan masing-masing yang unik.<sup>9</sup>

Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya.<sup>10</sup> Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Istilah “multibudaya” (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *melting pot*<sup>11</sup> yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan

---

<sup>7</sup> Sangkot Sirait dalam Nizar Ali (eds.), *Antologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm. 168.

<sup>8</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm. 8.

<sup>9</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 75

<sup>10</sup> Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, hlm. 1

<sup>11</sup> Lebih jauh Alo Liliweri menjelaskan bahwa banyak budaya hidup di daerah-daerah perbatasan antar Negara, antar-suku bangsa, antar-etnik, antar-ras, dan antar-geografis. Di sinilah muncul situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Kita menggunakan istilah *methaphors* untuk menggambarkan kebudayaan campuran (*mixed culture*). Ada beberapa istilah yang menggunakan *methapor* yaitu: *Pertama*, *melting pot* adalah masyarakat masih memelihara keunikan budaya untuk membedakan keturunan mereka dengan orang lain. Dalam konsep ini masing-masing etnis dengan budayanya menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun, dengan perbedaan tersebut mereka dapat membina hidup bersama dengan baik dan

Amerika khususnya di New York dan California.<sup>12</sup> Will Kymlicka berpendapat, multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya.<sup>13</sup>

James Banks dalam Choirul Mahfud, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan). Kemudian, bagaimana seseorang mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.<sup>14</sup> Jadi, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya.

Sementara itu Andersen dan Cusher (1994) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan yang dikemukakan di atas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan dalam definisi di atas, yaitu keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum.<sup>15</sup>

M. Ainul Yaqin memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-

---

sehat. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa melting pot terdapat kekuatan untuk mensintesis kebudayaan dari masing-masing kelompok. *Kedua*, tributaries yaitu menggambarkan aliran sungai yang airnya merupakan campuran dari air dari sungai-sungai kecil lain. Aliran sungai itu menuju ke arah yang sama, ke sebuah muara. Hal ini menggambarkan bahwa sungai itu merupakan lintasan dari sejumlah budaya yang terus mengalir. Masyarakat yang dibangun dari beberapa individu memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki oleh individu lain. Keanekaragaman karakteristik spesifik ini mengarah pada suatu muara yaitu bercampurnya berbagai karakteristik. Bervariasinya karakteristik tersebut sebenarnya sebagai media aliran berkembangnya kebudayaan yang akan dibangun. Berbeda dengan melting pot, pada tributaries keberbedaan antar suku tetap dipandang memiliki arti yang berbeda. Dengan demikian, setiap keberbedaan itu tetap dipertahankan meskipun berada pada tujuan yang sama untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya masing-masing. *Ketiga*, tapestry adalah bagaikan dekorasi pakaian yang terbentuk dari sehelai benang. Konsep ini diambil untuk menggambarkan kebudayaan Amerika yang dekoratif. Analog yang dapat disampaikan antara lain kain yang terdiri dari satu warna kurang memberikan hasrat bagi pemakainya. Dengan demikian, kain yang multiwarna sebagai perpaduan dekoratif akan memperkaya seni dekorasi tersebut. *Keempat*, garden salad/salad bowl adalah kebudayaan ibarat mangkuk yang berisi campuran salad. Pada konsep ini yang ada masing-masing kelompok etnis memperjuangkan keberhasilan kelompoknya sendiri. Dapat saja masing-masing kelompok etnis hidup berdampingan tetapi tidak peduli satu dengan yang lainnya. Masing-masing masyarakat mengurus dirinya sendiri dan dapat hidup bersama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok lainnya. Olehnya, Garden Salad/Salad Bowl tidak memperdulikan adanya komitmen untuk mengetahui dan saling berbagi antar unsure-unsur kebudayaan yang dimiliki kelompok lain.

<sup>12</sup> James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984), hlm 164

<sup>13</sup> Will Kymlicka, "Mitsunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), hlm 24

<sup>14</sup> Choirul Mahfud, *Op. Cit.*, hlm. 175

<sup>15</sup> Andersen dan Cusher, "Multicultural and Intercultural Studies" dalam C. Marsh (ed), *Teaching Studies of Society and Environment* (Sydney: Prentice-Hall, 1994), hlm. 320.

perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi mudah.<sup>16</sup>

John W. Santrock mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi prespektif dari beragam kelompok kultural atas dasar basis regular.<sup>17</sup>

Mundzier Suparta dalam bukunya *Islamic Multicultural Education*, mencatat lebih dari sepuluh definisi tentang pendidikan multikultural,<sup>18</sup> diantaranya adalah; (a) Pendidikan Multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok maupun bangsa. (b) Pendidikan Multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (*equality*), saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. (c) Pendidikan Multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya; dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik dan memberangus praktik-praktek penindasan. (d) Pendidikan Multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan intruksi yang menindas dan hubungan antar personal di dalam kelas dan memberikan prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial.

Menurut pendapat Bloom, pendidikan multibudaya sarat dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk. Lebih lanjut Bloom menegaskan bahwa pendidikan multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.<sup>19</sup> Bloom membagi tiga elemen dalam pendidikan multibudaya, *pertama*,

---

<sup>16</sup> M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm 25

<sup>17</sup> John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, Terj. Tri Wibowo B.S. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.184

<sup>18</sup> Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Al Ghazali Center, 2008), hlm. 37

<sup>19</sup> A. Lawrence Blum, *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins Chobanian, *Etika*

menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. *Kedua*, menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik/kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. *Ketiga*, menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri; yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara.<sup>20</sup>

Menurut Muhaimin el Ma'hady sebagaimana dikutip Choirul Mahfud mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global).<sup>21</sup>

Selanjutnya Menurut Hilmy multikulturalisme adalah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku (etnis), dan agama. Sehingga sebuah bangsa dikatakan multikultur adalah ketika suatu bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai.<sup>22</sup>

Hal ini juga senada dengan yang diutarakan Prihanto, bahwa multikulturalisme merupakan sebuah gerakan yang menuntut pengakuan (*politicts of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi, serta dijamin eksistensinya.<sup>23</sup>

Sonia Nieto mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Model pendidikan ini menentang segala bentuk rasisme dan bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, jender, dan lain sebagainya) yang terefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru.<sup>24</sup>

Sementara itu, Bikkhu Parekh mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai sebuah pendidikan yang bebas dari prasangka dan bias entosentris serta bebas untuk mengeksplorasi dan mempelajari berbagai budaya dan perspektif lain.<sup>25</sup>

---

*Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 16

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>21</sup> Mahfud, *Op. Cit.*, hlm.176

<sup>22</sup> Masdar Hilmy, "Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikulturalisme", hlm. 337

<sup>23</sup> Prihanto, "Kritik atas Konsep Pendidikan Multikulturalisme", hlm.45

<sup>24</sup> Sonia Nieto, *Language, Culture, and Teaching*, (Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, 2002), hlm. 29

<sup>25</sup> Bikkhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (Cambridge: Harvard University Press, 2000), hlm. 230

Kemudian dalam perspektif Azyumardi Azra, pendidikan multikultural merupakan suatu model pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Selanjutnya, Musya Asy'arie mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai proses penanaman cara hidup menghargai, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.<sup>27</sup>

Demikian halnya, Tilaar mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu wacana yang lintas batas, karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (*social justice*), demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>28</sup>

Sedangkan Zakiyuddin Baidhawiy menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, definisi yang disampaikan Zakiyuddin Baidhawiy adalah definisi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia.

Hilda Hernandez dalam Choirul Mahfud mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.<sup>30</sup> Hal ini berarti bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire (pakar pendidikan pembebasan), bahwa pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan

---

<sup>26</sup> Azyumardi Azra, “Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia”, Makalah disampaikan pada Orasi Budaya, *Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (IMPULSE)*, di Auditorium Kanisius, Yogyakarta, pada 30 Agustus 2007. Lihat pula Mashadi Imron, *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme* (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009), hlm. 48

<sup>27</sup> Musya Asy'arie, “Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa”, <http://www.64.203.71.11/kompas/cetak/0409/03/opini/1246546.htm>. (Diakses pada 10 Mei 2017)

<sup>28</sup> H.A.R Tilaar, *Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural*, (Jakarta: IndonesiaTeras, 2003), hlm.167

<sup>29</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: PT Erlangga, 2005), hlm. 8

<sup>30</sup> Choirul Mahfud, *Op. Cit.*, hlm. 176

tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menawarkan satu alternatif melalui implementasi strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang terdapat dalam masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti pluralitas etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, jender, kemampuan, umur, dan ras. Strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan supaya peserta didik mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, namun juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar senantiasa berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis.

### **C. Sejarah Munculnya Pendidikan Multikulturalisme**

Sejarah munculnya pendidikan multikulturalisme, diwacana-kan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat kerja, dan lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Karena ketika itu hanya dikenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih beragama Kristen. Adapun golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka.<sup>32</sup>

Gerakan hak-hak sipil tersebut, menurut James A. Banks berimplikasi pada dunia pendidikan dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Menurutnya, lembaga-lembaga pendidikan di Amerika pada tahun 1960-an dan 1970-an belum memberikan kesempatan yang sama bagi semua ras untuk memperoleh pendidikan.<sup>33</sup> Praktik pendidikan yang diskriminatif ini juga menuai protes dari tokoh gerakan hak-hak sipil dan lembaga ilmiah. Pada intinya mereka menuntut agar diadakan reformasi dalam pendidikan.

Selain gerakan-gerakan, ada juga yang merespons praktik kehidupan diskriminatif di Amerika dengan mendirikan pusat-pusat studi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*). George Washington William

---

<sup>31</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Pembebasan*, (Jakarta: LP3S, 2000), hlm. 21

<sup>32</sup> Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium International ke-3, (Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002), hlm.1

<sup>33</sup> Lihat James A. Banks & Cherry A. McGee Bank, *Multikultural Education Issues and Perspectives*, (Boston: Allyn and Bacon, 1989), hlm. 4-5. Lihat juga, Geneva Gay, "A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education," dalam <http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le0gay.htm>

adalah di antara sarjana yang mendirikan pusat studi etnik yang mengkaji gambaran negatif dan stereotip terhadap orang-orang Afrika-Amerika. Melalui kajian tersebut, mereka menunjukkan komitmen personal, profesional, dan abadi untuk mengangkat derajat orang-orang Afrika-Amerika. Ada juga tuntutan dari para pemikir pendidikan dan para guru di sekolah-sekolah Amerika secara Individual. Mereka adalah James A. Banks, Joel Spring, Peter McLaren, dll.

Wacana pendidikan multikultural juga berhembus sampai ke Indonesia.<sup>34</sup> Menurut Abdullah Aly,<sup>35</sup> wacana ini mulai digulirkan sekitar tahun 2000, melalui berbagai diskusi, seminar, workshop, yang kemudian disusul dengan penelitian serta penerbitan buku dapat dipahami bahwa sebenarnya multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dan jurnal yang bertema multikulturalisme.<sup>36</sup> Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia juga digemakan oleh para penulis melalui media massa. Banyak tulisan yang beredar di jurnal, surat kabar, dan majalah yang intinya mengusulkan agar diterapkannya pendidikan multikultural di Indonesia. Mereka memandang bahwa dalam masyarakat yang multikultural, seperti Indonesia, penerapan pendidikan multikultural merupakan keharusan yang mendesak. Pendidikan multikultural dapat mendidik para peserta didik bersedia menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Mata pelajaran yang dapat dijadikan sarana untuk mendidik antara lain, adalah bahasa Indonesia,<sup>37</sup> Pendidikan seni Nusantara,<sup>38</sup> dan Pendidikan Agama.<sup>39</sup> Materi tersebut dijadikan sarana untuk memasukkan

---

<sup>34</sup>Wacana pendidikan multikultural dalam batas-batas tertentu mendapat respon positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal tersebut terbukti dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat multikultural (Bab III, pasal 4, ayat 1). Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana yang termaktub pada Bab III, pasal 4, ayat 1: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

<sup>35</sup> Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 97

<sup>36</sup> Pada tahun 2000, Jurnal Antropologi Indonesia Departemen Antropologi Universitas Indonesia mengadakan symposium internasional di Makassar dengan mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, pendidikan, nasionalisme, konflik social, problem identitas dan etnisitas, hubungan kekuasaan dengan respon lokal terhadap keragaman. Pada Tahun 2001 dan 2002, juga diadakan symposium serupa dengan mengambil tempat di Padang dan Denpasar. Pada tahun 2003, Jurnal Antropologi Indonesia menyelenggarakan workshop regional dengan tema: *Multicultural Education in Southeast Asian Nation: Sharing Experience*. Lebih jelas lihat, Abdullah aly, *Pendidikan Multikultural.....*, hlm. 97-98. Pada Tahun 2007, Badan Litbang Departemen Agama mengadakan penelitian tentang '*Pemahaman Nilai-Nilai Multikulturalisme Para Da'i*'. Lihat, Adian Husaini, *Membendung Arus Liberalisme di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 344

<sup>37</sup> Anton M. Moeliono, *Keaneka-an Bahasa dalam Keaneka-an Budaya*, dalam Media Indonesia, Edisi akhir Tahun 2002: Satu Indonesia, P. 1-12. Lihat juga, Dendy Sugono, *Bahasa Indonesia: Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia*, dalam Media Indonesia, Edisi Akhir Tahun 2002: satu Indonesia, h. 1-6

<sup>38</sup> Pudentia, *Peranan Pendidikan Seni Nusantara dalam Pembentukan Pluralisme*, dalam Media Indonesia, Edisi Akhir Tahun 2002: Satu Indonesia, hlm. 1-4

<sup>39</sup> M. Amin Abdullah, *Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan agama* dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan,

ide pendidikan multikulturalisme, termasuk mereorientasikan pembelajaran agama. Namun Sebuah bangsa tidak akan berkembang apabila tingkat pluralitasnya kecil. Begitu pula dengan sebuah bangsa yang besar jumlah perbedaan kebudayaannya, akan menjadi kerdil apabila ditekan secara institusional. Berangkat dari kronologi pergulatan wacana tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya multikulturalisme adalah sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama.<sup>40</sup> Selanjutnya, yang melatar belakangi munculnya gagasan, dan wacana mengenai pendidikan multikultural adalah adanya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dipraktekkan oleh pemerintah orde baru. Pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, ras, agama, maupun budayanya. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hanya terlihat semangot ke-Ika-annya daripada ke-Bhineka-annya. Keberagaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, guna menyempurnakan pemahaman, bahwa pendidikan multikulturalisme, Secara garis besar memiliki karakter-karakter tersendiri, diantaranya, *Pertama*: eksistensi pihak yang lemah diberi perhatian khusus dan ditingkatkan keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, *Kedua*: pada saat tertentu bersikap inklusif, dengan menawarkan teori bagi pihak yang lemah. *Ketiga*: teori lain terutama teori yang terkait dengan dunia sosial dan teori multikultural itu sendiri dikritisi oleh teoritis multikultural *Keempat*: Teoritis multikultural menyadari bahwa mereka dibatasi oleh sejarah, konteks kultural, dan konteks tertentu. *Kelima*: teori bagi pihak yang lemah disusun dan diubah struktur sosial, prospek, dan kultur individu mereka oleh teoritis multikultural. *Keenam*: dunia sosial dan intelektual diupayakan oleh teoritis multikultural menjadi lebih terbuka dan beragam.<sup>42</sup> Selain karakter pendidikan multikultural yang telah disebut di atas, didukung oleh tiga karakteristik pendidikan multikultural lainnya, yaitu, *Pertama*: pendidikan multikulturalisme berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan, *kedua*: pendidikan multikultural berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian, serta *ketiga*: pendidikan multikultural mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai

---

Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm.14. Lihat Juga Abdul Munir Mul Khan, *Humanisasi Pendidikan Islam* dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm.17-18. Lihat juga, Busman

Edyar, *RUU Sisdiknas dan Pemikiran Pluralisme Multikultural*, (Kompas, Maret 2003) edisi 31.

<sup>40</sup> Khoiril Mahfud, *Pendidikan Multikultural*..... hlm. 91

<sup>41</sup> James, A. Banks, *Multikultural Education and Goals* dalam James A. Banks dan Cherry A. Mcgee Banks (eds), *Multicultural Education; Issues and Perspectives*, (America: Allyn Bacon, 1997), hlm. 14

<sup>42</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 106-107

keragaman budaya. Kemudian pendidikan multikulturalisme tidak lepas dari permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu: politik, demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja, HAM, hak budaya komunitas, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral.<sup>43</sup> Pada tataran aplikasi, paham multikulturalisme mulai dihembuskan, dengan mengkonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “*integrating forse*” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya.<sup>44</sup>

#### **D. Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural**

Pada umumnya, pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial dan kekerasan semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya.<sup>45</sup>

Sebenarnya akar timbulnya berbagai konflik sosial yang mem-buahkan anarki yang berkepanjangan, seringkali memang tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi dalam kenyataannya agama selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai konflik sosial tersebut.

Potensi konflik dan disintegrasi tersebut disebabkan karena agama dalam manifestasinya bersifat ambivalen terhadap persatuan dan kesatuan. Artinya, meskipun agama memiliki kekuatan pemersatu, agama juga mempunyai kekuatan pemecah belah. Ada beberapa alasan menurut Din Syamsuddin mengapa agama memiliki ambivalensi seperti itu, salah satunya adalah agama memiliki kecenderungan absolutistik yaitu kecenderungan untuk memutlakkan keyakinan keagamaannya sebagai kebenaran tunggal. Akibatnya muncul rejeksionis yaitu penolakan terhadap kebenaran agama lain<sup>46</sup> yang dianggap berbeda dari dan berlawanan dengan yang lain. Akar konflik keagamaan seperti ini kata Arthur D'Adamo karena para pemeluk agama mengambil sikap untuk memandang agama dari sudut pandang agamanya sendiri.<sup>47</sup> Sehingga yang lebih mencuat ke permukaan bukannya esensi kebenaran yang hendak ditawarkan oleh agama, melainkan semangat untuk menegasikan yang lain.

---

<sup>43</sup> Khoiril Mahfud, *Pendidikan Multikultural*.....hlm. 96

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm, 88

<sup>45</sup> Musa Asy'arie, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/12465.htm>. 2004.

<sup>46</sup> M. Din Syamsuddin, "Mengelola Pluralitas Agama" dalam *Jawa Pos*, (12 Mei 1996), hlm. 4-5.

<sup>47</sup> Budhy Munawar Rachman, “pengantar” dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. xxiv-xxvii

Disebabkan oleh truth claim itulah, maka setiap agama menyatakan ajarannya merupakan totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial sehingga secara kodrati cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya. Namun ketika agama-agama itu hadir secara historis, ia berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, maka akan berimplikasi pada perilaku sosial. Dalam konteks inilah pandangan inklusif sangat diperlukan untuk menerima kenyataan hidup pluralisme<sup>48</sup> sebagai syarat mutlak bagi para penganut agama apapun.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan-akan hanya agamanya sendirilah yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini, sudah barang tentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural, dan akan memperlemah persatuan bangsa. Karena itu, pendidikan agama Islam harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif dan berwawasan multikultural sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya.

Karena pada dasarnya masyarakat multikultural tidak hanya ciri khas masyarakat Indonesia. Dalam pengalaman paling dini historisitas keberagaman Islam era kenabian Muhammad, masyarakat yang pluralistik secara religius telah terbentuk bahkan telah menjadi kesadaran umum pada saat itu. Kondisi demikian merupakan suatu kewajaran lantaran secara kronologis agama Islam memang muncul setelah beberapa agama yang telah ada sebelumnya.

Bukti empiris sejarah peradaban Islam di masa lalu, menunjukkan Islam tampil secara inklusif dan sangat menghargai non-muslim.<sup>49</sup> Sikap inklusif ini ada karena al-Qur'an mengajarkan paham religius plurality.<sup>50</sup> Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keragaman agama. Meskipun ada klaim bahwa kebenaran agama ada pada Islam,<sup>51</sup> namun dalam al-Qur'an juga disebutkan adanya hak orang

---

<sup>48</sup>Terdapat pengertian pluralitas yang belum tentu disertai pluralisme. Pluralitas adalah semata-mata kenyataan majemuk, sedangkan pluralisme adalah paham yang menerima kenyataan majemuk itu sebagai sesuatu yang positif. Pluralisme juga tidak semata-mata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan akan tetapi yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Lihat Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (konsepsi dan aktualisasi)" dalam *HAM dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: PKSK, 1997), hlm. 71.

<sup>49</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), hlm. 102.

<sup>50</sup> Ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada: yaitu karena semua agama pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persentuhan nilai satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu pada satu titik pertemuan atau dalam termonologi al-Qur'an disebut kalimah sawâ'.

<sup>51</sup> QS. Âli Imrân : 13.

lain untuk beragama. Dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.<sup>52</sup> Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.

Inklusivisme Islam tersebut juga memberikan formulasi bahwa Islam adalah agama terbuka. Islam menolak eksklusivisme, absolutisme dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar bisa melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat al-Qur'an agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu (*kalimat sawâ'*) antara semuanya.<sup>53</sup> Walaupun rumusan linguistik dan verbal keyakinan keagamaan itu berbeda-beda dapat dipastikan bahwa eksternalisasi keimanan itu dalam dimensi kemanusiaan tentu sama.

Ajaran tauhid dalam Islam mengandung pengertian adanya suatu orde yang satu sekaligus menyeluruh. Dengan kata lain, terdapat hukum abadi yang universal. Menurut Marcel A. Boisard,<sup>54</sup> hukum yang abadi dan berlaku secara universal adalah berawal dari suatu keyakinan bahwa manusia adalah satu dan tercipta karena kehendak yang satu, yaitu Tuhan pencipta alam. Kesadaran demikian hanya bisa tumbuh pada manusia yang menyadari prinsip-prinsip moral yang dapat mempersatukan perasaan yang merupakan dasar kebijakan universal.

Implikasi dari keyakinan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu yaitu Tuhan, berarti manusia seluruhnya adalah makhluk Tuhan. Dengan demikian seluruh manusia adalah bersaudara karena sama-sama makhluk Tuhan. Adanya persamaan keyakinan sama-sama makhluk Tuhan dan rasa persaudaraan tersebut menurut Harun Nasution bisa menjadi landasan toleransi.<sup>55</sup> Adanya keyakinan itu mengasumsikan bahwa ciptaan-Nya juga pada hakikatnya adalah suatu kesatuan. Pandangan ini membawa pada kesimpulan bahwa seluruh jagad raya (*universe*) termasuk di dalamnya seluruh umat manusia apapun bangsa dan bahasanya adalah merupakan makhluk Tuhan juga, meskipun agama dan keyakinannya berbeda.

Seorang agamawan memang dituntut untuk mempunyai sikap yang "lebih" realistik ketika berhadapan dengan realitas empirik kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik, terutama dalam memposisikan agama. Seperti dikemukakan oleh Hans Kung bahwa kedudukan agama harus dilihat dari dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam.<sup>56</sup> *Pertama*, dari

---

<sup>52</sup> QS. al-Baqarah : 256.

<sup>53</sup> QS. Âli 'Imrân : 64.

<sup>54</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 184.

<sup>55</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 269.

<sup>56</sup> ST. Sunardi, *Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama" dalam Seri DIAN I Dialog, Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan DIAN, 1994), hlm. 66-67.

luar, diakui adanya bermacam-macam agama yang benar. Inilah dimensi relatif suatu agama. Agama-agama ini mempunyai satu tujuan yaitu keselamatan (dengan konsep berbeda-beda) dengan jalan berbeda-beda. Lewat perbedaan ini, agama-agama bisa memperkaya satu sama lain. *Kedua*, dari dalam, diakui adanya satu agama yang benar, inilah dimensi mutlak suatu agama. Pendirian ini tidak harus menolak kebenaran agama-agama lain, walaupun benar pada tingkat-tingkat tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan pesan agama yang dianut.

Melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etik yang fundamental yang dimiliki oleh peserta didik dapat menjadi benang merah yang dapat menghubungkan pengikut agama satu dengan lainnya sekaligus dapat menjadi *entri point* untuk mencari titik temu atau dalam terminologi al-Qur'an disebut *kalimat sawâ'*.

Bertolak dari pandangan ini, dimungkinkan bahwa Islam dapat menjadi pijakan bagi pendidikan multikultural tersebut. Konflik sosial yang mewarnai pasang surutnya persatuan Indonesia harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai oleh kemampuan manajemen politik bangsa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang memecah belah persatuan Indonesia. Salah satu cara strategis adalah pendidikan multikultural yang dilakukan secara aktual, cerdas, dan jujur.

## **E. Penutup**

Pendidikan apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional. Karena itu untuk mengatasi problem kemanusiaan yang ada, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang multidimensional. Dan, di dalamnya adalah pendidikan multikultural.

## **F. Daftar Pustaka**

- Abdullah, M. Amin. 2005. *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP
- Aly, Abdullah. 2011. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, (Yogyakarta: PustakaPelajar
- Andersen dan Cusher. 1994. *Multicultural and Intercultural Studies*. dalam C. Marsh (ed), *Teaching Studies of Society and Environment*. Sydney Prentice-Hall
- Asy'arie, Musya. "Pendidikan Mulikultural dan Konflik Bangsa", <http://www.64.203.71.11/kompas/cetak/0409/03/opini/1246546.htm>. (Diakses pada 10 Mei 2017)

- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: PT Erlangga
- Banks, James. 1984. *Teaching Strategies For Ethnic Studies*. Newton: Allyn and Bacon
- Bloom, Lawrence. 2001. *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*. dalam Larry May, dan Shari Colins Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro Yogyakarta: Tiara Wacana
- Boisard, Marcel A. 1982. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3S
- Hidayat, Komaruddin dan Nafis, Muhammad wahyuni. 1995. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Yayasan Paramadina
- Imron, Mashadi. 2009. *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balai Litbang Agama
- Kymlicka, Will. 1999. *Mitsunderstanding Nationalism" dalam Theorizing Nationalism, ed. R. Beiner*. Albany: State University of New York
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina
- Mahfud, Choirul. 2013. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan
- Nieto, Sonia. 2002. *Language, Culture, and Teaching*. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum
- Parekh, Bikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2003. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana
- Santrock, John W. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana
- Sauqi, Achmad dan Naim, Ngainun. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sirait, Sangkot dalam Nizar Ali. 2010. *Antologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Idea Press
- Sunardi, ST. 1994. *Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama" dalam Seri DIAN I Dialog, Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan DIAN
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium International ke-3, (Denpasar Bali, 16-21 Juli

- Suparta, Mundzier. 2008. *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Al Ghazali Center
- Tilaar, H.A.R.2003.*Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural*.Jakarta: IndonesiaTeras
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.Jakarta: Cemerlang
- Yaqin, M. Ainul. 2005.*Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media